

MENGURANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK BERBASIS PENDEKATAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Nur Kholis

FTIK IAIN Tulungagung

Email: fakhryaqil@gmail.com

Abstract: *Humans have their own potential as an instrument to perfect their existence. In the process of perfecting, they always do some processes as well as social interactions to optimize any potential they had by synchronizing internal and external potentials of their social environment. A phenomenon shows that there are two possibilities resulted by the process: harmony or clash. The process of harmony is indicated by accomplishment of any objectives or needs of each individual that does the social interaction. On the contrary, the clash process will happen if the interactions turn to violence on weak/poor individual or group, either structurally or culturally, socially, and economically. One of causes of the clash resulting violence is the absence of social control, imbalance of hierarchical interaction, social imbalance and poor economy. Multicultural education can be set as an approach in learning/education in Indonesia by firstly examining its philosophical background and educational theory which, then, leads to the method(s) and technique(s) of learning/education to shape generation that have the following characteristics: tolerated, social-characterized, and aware to certainty of diversity as sunatullah that hopefully results in decreasing clash phenomena which lead to any violence or conflict.*

المخلص: كل انسان له قوة مُحركة لاتمام كيان وجوده. وفي عملية ذلك طرقوا كل سبيل وعاملوا كل معاملة اجتماعية حتي تكتمل تلك القوة بمجانيها: الجانب النفسي الداخلي والجانب الاجتماعي الخارجي. والظاهرة تدلنا أن هناك احتمالان في تلك المعاملات، هما الانسجام والصراع. الانسجام يأتي حينما يأخذ كل فرد في تلك المعاملات الاجتماعية ما يرغبه وما يحتاجه. اما الصراع يحدث حينما حاول بعض الأفراد القوية في تلك المعاملات الاجتماعية أن يستغلوا الأفراد الأخرين الضعفاء في المجالات الساسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. والباعث الأصيل لذلك الصراع

والعنف هو عدم التضامن الاجتماعي وعدم الانسجام في العلاقة بين أعضاء المجتمع ووجود الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الأثرياء والفقراء. التربية المتعددة الثقافات تأتي كنهج جديد في مجال التربية والتعليم في أندونيسيا المبني علي الأسس الفلسفية والنظرية والمنهجية والتقنية الرامية لإخراج جيل جديد يمتاز بالسماحة والحذاقة والوعي والفهم التام لمعني التعدد والتنوع في كل مجال من مجالات الحياة. فليس ببعيد بأن يكون هذا النهج الجديد يستطيع أن يخفض نسبة الصراع والعنف داخل المجتمع الذي نحن فيه.

Abstrak: *Setiap manusia diberi potensi sebagai alat untuk menyempurnakan eksistensinya, dalam proses penyempurnaan itu ia selalu melakukan proses-proses dan interaksi sosial untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki tersebut dengan cara mensinergikan antara potensi internal dengan potensi eksternal lingkungan sosialnya. Fenomena menunjukkan bahwa dalam proses tersebut timbul dua kemungkinan, yaitu harmonis dan konflik. Proses harmonis mengarah pada terpenuhinya tujuan atau kebutuhan masing-masing individu yang berinteraksi sosial, sebaliknya terjadi proses konflik jika hubungan mengarah pada timbulnya kekerasan terhadap orang/kelompok yang lemah, baik secara struktur maupun kultur, sosial, dan ekonomi. Pemicu timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan di antaranya adalah tidak adanya kontrol sosial, ketidakseimbangan hubungan hirarkhis, ketimpangan sosial dan ekonomi yang lemah (miskin). Pendidikan multikultural dapat diposisikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran/pendidikan di Indonesia dengan terlebih dahulu mengkaji landasan filsafat dan teori pendidikannya yang selanjutnya ditemukan metode dan teknik pembelajaran/pendidikan untuk melahirkan generasi yang berciri utama; bertolernansi, berkarakter sosial, dan kesadaran atas keniscayaan sunnatullah keragaman sehingga dapat mengurangi fenomena konflik yang berujung kekerasan, dan konflik.*

Keywords: struktur korban, superordinate, subordinate, pendekatan, pendidikan multikultural.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang berdimensi kompleks, selain sebagai makhluk individual ia juga sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik berupa manusia maupun berupa lingkungan alam, dalam kesehariannya ia tidak bisa lepas dari perilaku-perilaku sosial. Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan, sedangkan sosial berkenaan dengan kehidupan masyarakat, jadi perilaku sosial merupakan tanggapan, respon atau reaksi individu dan/atau komunitas manusia terhadap rangsangan yang terjadi diinternal individu bersangkutan dan orang-orang atau lingkungan sosial sekitarnya. Perilaku sosial dapat disinonimkan dengan perilaku kolektif. Menurut Coleman, perilaku kolektif merupakan pengalihan kontrol yang sederhana (dan rasional) terhadap tindakan satu pelaku kepada pelaku lain, setiap tindakan manusia, baik secara individual maupun kelompok merupakan reaksi atas rangsangan eksternal yang diterima melalui panca inderanya.¹ Penerimaan panca indra atas rangsangan tersebut diolah oleh sistem reseptor yang kemudian diteruskan kepada sistem efektor sehingga memungkinkan dapat menggerakkan untuk terjadinya perilaku sosial.

Menurut Cassirer manusia merupakan *animal symbolicum*.² Kesimpulan Cassirer tersebut didasarkan pada hasil penelitian J.Von Uexkuell tentang binatang bahwa setiap organisme mutlak dicocokkan dengan lingkungannya (*umwelt*). Sesuai dengan struktur anatominya, setiap organisme mempunyai sistem reseptor (*merknetz*) yang berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar, terdapat sistem efektor (*wirknetz*) yang berfungsi sebagai pereaksi terhadap rangsangan dari luar tersebut. Kedua sistem ini menjalin kerja saling melengkapi, bahu membahu sebagai prasyarat bagi kehidupan setiap organisme, dan keterjalinan kedua sistem itu disebut sebagai lingkaran fungsional (*funktionskreis*) binatang. Lebih lanjut menurut Cassirer bahwa lingkaran fungsional itu lebih luas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif setelah mengalami

¹James S. Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial Referensi bagi Reformasi, Restorasi dan Revolusi* (Bandung: Nusa Media, 2008), 241.

²Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 80.

perubahan. Antara sistem reseptor dengan efektor terdapat sistem simbolik yang membedakan manusia dengan binatang. Setiap manusia mempunyai ketiga sistem fungsi tersebut sesuai dengan tingkat kualifikasinya sehingga dapat menghasilkan pengetahuan, konsep, teori, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bahkan peradaban yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya dan terus mengalami penyempurnaan sampai tak terbatas waktu.

Perilaku sosial bagi manusia merupakan suasana saling ketergantungan yang merupakan keniscayaan bagi manusia dan komunitasnya untuk keberlangsungan eksistensinya. Setiap individu manusia pada dasarnya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam setiap aspek kehidupannya. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, saling membantu, saling berbagi, tidak saling mengganggu hak orang lain, dan tentu diperlukan toleransi dalam hidup bermasyarakat. Perilaku sosial akan tampak dalam pola-pola respon antara individu satu dengan lainnya yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik. Perilaku tersebut ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial merupakan sifat relatif dalam menanggapi dan merespon orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya, sementara di pihak lain ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung sendiri.

Perilaku sosial oleh karenanya merupakan pengejawantahan dari hakekat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana diuraikan oleh Fromm bahwa Darwin sangat menyadari jika manusia dicirikan tidak hanya dengan fisik yang khas, tetapi juga dengan sifat-sifat psikis tertentu.³ Sebanding dengan kecerdasannya yang lebih tinggi, perilaku manusia lebih lentur (*flexible*), namun kurang memiliki refleks dan insting dibanding binatang lain, manusia mampu berfikir dan meningkatkan sifat adaptif perilakunya dengan

³Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, terj. Imam Muttaqien, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 312-314.

cara-cara yang masuk akal, manusia merupakan individu yang berbudaya dan bermasyarakat, ia telah mengembangkan budaya dan masyarakat yang unik, baik jenis maupun kompleksitasnya. Pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada aspek eksternal situasi sosial memegang peranan yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial yang mempengaruhi perilaku sosial. Contoh situasi sosial misalnya di lingkungan pasar, di lingkungan pesantren, di masjid, di tempat rapat, dan lain sebagainya.

Perilaku sosial ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Konflik-konflik yang terjadi antara individu satu dengan lainnya, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya merupakan bagian dari contoh perilaku sosial negatif. Konflik-konflik demikian jika tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang baik, biasanya menggunakan bentuk kekerasan. Terdapat beberapa faktor yang setidaknya dapat mempengaruhi perilaku sosial, yaitu karakteristik orang-orang sekitarnya, proses kognitif, lingkungan dan latar belakang budaya. Pada kasus yang dilatarbelakangi budaya misalnya tempat perilaku dan pemikiran sosial individu terjadi, contoh dari etnis budaya tertentu akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Berbagai bentuk dan jenis perilaku sosial seseorang pada dasarnya merupakan karakter atau ciri kepribadian yang dapat diamati ketika seseorang berinteraksi dengan kelompok lain. Kecenderungan perilaku sosial seseorang yang menjadi anggota kelompok akan terlihat jelas di antara anggota kelompok yang lainnya, setiap orang memiliki perspektif dan persepsi yang berbeda tentang problem-problem yang dapat memicu ketegangan dan perselisihan, perbedaan inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik. Konflik muncul karena adanya hasrat kompetisi di antara manusia dalam mengeksplorasi sumber daya alam, memperebutkan kekuasaan, dan status. Seringkali, dalam memperebutkan nilai, kekuasaan,

dan sumber daya alam, berbagai pihak tidak mau mengafirmasi motif dan tujuan kelompok lain, dari sinilah konflik sering terjadi.

KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan merupakan bentuk penyelesaian negatif dari konflik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Secara historis sebagian besar konflik yang timbul antar manusia (antar golongan, jenis kelamin, suku, ras, dan agama) diselesaikan dengan cara-cara kekerasan penuh dengan kebencian dan kejam yang mengakibatkan ratusan ribu manusia kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, hancurnya lingkungan hidup bahkan jutaan nyawa harus melayang secara sia-sia.⁴ Bentuk-bentuk fenomena konflik di masyarakat di antaranya adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan dan ketegangan antara individu atau kelompok masyarakat berlatarbelakang perbedaan suku, ras, etnis, agama dan budaya, memperkuat sifat-sifat perbedaan demikian semakin memperkuat terjadinya konflik di antara mereka.

Sumber konflik antara lain adalah konflik struktural, konflik kepentingan, konflik nilai, konflik hubungan antar manusia dan konflik data.⁵ Yang relevan dengan kajian ini adalah konflik hubungan antar manusia, yaitu yang terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi atau tingkah laku negatif yang berulang. Masalah-masalah ini sering menghasilkan konflik-konflik yang tidak realistis atau tidak perlu, karena konflik ini bisa terjadi bahkan ketika kondisi obyektif untuk terjadinya konflik, seperti terbatasnya sumber daya atau tujuan-tujuan bersama yang eksklusif, tidak ada. Masalah hubungan antar manusia seperti yang disebut di atas, seringkali memicu pertikaian dan menjurus pada lingkaran spiral dari suatu konflik destruktif yang tidak perlu. Ketidakmampuan menyelesaikan konflik demikian dapat melahirkan kekerasan di antara mereka, fenomena kekerasan terhadap anak misalnya banyak disebabkan oleh faktor demikian.

⁴Budi Wijardjo, Ichsan Malik, Noer Fauzi & Antonette Royo, *Konflik, Bahaya atau Peluang?* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 32.

⁵*Ibid.*, 52-53.

Kekerasan dimaknai sebagai suatu tindakan fisik yang menggunakan kekerasan terhadap seseorang, misalnya penganiayaan, pembunuhan atau perkosaan. Kekerasan terhadap anak menurut UNICEF lebih menekankan pada dua hal, yaitu *pertama*, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku. *Kedua*, menyebabkan kerugian bagi korban, baik fisik maupun psikologis. Kekerasan juga dapat dimaknai bahwa setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman.⁶ Perasaan tidak nyaman pada kenyataannya dapat berbentuk antara lain: khawatir, takut, sedih, mudah tersinggung, jengkel, atau marah. Keadaan fisik yang tidak nyaman bisa berupa lecet, luka, memar, patah tulang dan lain-lain.

Hal yang perlu dikritisi kebanyakan yang terjadi di masyarakat adalah bahwa ketidaknyamanan akibat buruk dari kekerasan yang dialami korban tidak selalu karena kesengajaan. Katakanlah meskipun disengaja, tetapi maksudnya bisa jadi bukan semata untuk menyakiti tetapi untuk hal lain, misalnya untuk mendisiplinkan, mendidik, dan sebagainya, contohnya tindakan guru atau orang tua yang menghukum murid atau anaknya kelewat batas, sehingga berakibat fatal secara fisik. Dengan demikian kekerasan terhadap anak, khususnya dalam keluarga, sangat terkait secara signifikan dengan ketentuan-ketentuan normatif (*set of normatively*) suatu keluarga dalam masyarakat. Artinya kekerasan pada masyarakat tertentu dianggap sebagai hal yang lazim, bahkan suatu keharusan dan karena itu dibenarkan, namun tindakan yang sama akan ditentang keras oleh karena tindakan tersebut dinilai sebagai hal melanggar hak-hak anak. Hal ini terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma suatu masyarakat bahwa tolok ukur kebaikan suatu keluarga dapat ditunjukkan dari kebaikan (kepatuhan) anak terhadap orang tuannya. Banyak cara yang dapat dilakukan misalnya memukul, menjewer, menyabet, dan lain-lain sebagai instrument bagi orang tua agar anaknya mematuhi segala perintahnya. Dalam konteks budaya masyarakat Islam tradisional terungkap dengan istilah *sami'nā wa aṭa'nā* (saya mendengar dan mematuhinya) dan

⁶Heddy Shri Ahimsa Putra, "Tindak Kekerasan terhadap Anak: Bentuk, Pelaku dan Kondisinya", dalam *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000), 58.

sebaliknya anak yang “nakal” dan apalagi “membangkang” adalah pertanda citra buruk orang tua (keluarga). Implementasi nilai budaya seperti ini dalam suatu masyarakat cenderung bias, oleh karenanya sulit dibedakan apakah tindak kekerasan (*violence*) yang dilakukan orang tua atau guru dan orang dewasa lainnya terhadap anak atau muridnya bermaksud mendidik atau menyakiti.

Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak adalah fisik dan psikis. Kekerasan fisik terjadi ketika mereka dengan sengaja disakiti secara fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik yang berakibat seperti memar, luka bakar, sobekan, atau tanda gigit, tanda-tanda kekerasan fisik lebih mudah dilihat daripada akibat kekerasan psikis. Namun demikian tidak semua bentuk kekerasan fisik selalu dapat diketahui akibatnya secara empiris, karena bekas-bekas kekerasan ini dapat hilang setelah beberapa waktu kejadian. Oleh karena itu, pendekatan klinis semata untuk mengetahuinya tidak memadai, hal ini tentunya berimplikasi pada metode pengumpulan data di lapangan. Sedangkan kekerasan psikis adalah ketidaknyamanan secara psikis misalnya menimbulkan rasa takut, resah, khawatir, sedih, putus asa dan trauma. Pemulihan akibat dari kekerasan psikis membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dengan terapi-terapi tertentu oleh ahli.

STRUKTUR KORBAN LEMAH

Pemilihan term “struktural” didasarkan pada asumsi bahwa dalam konteks hubungan anak dengan orang yang lebih dewasa tidak berada pada ruang yang hampa, tetapi ada situasi, kondisi dan orang-orang di sekitarnya. Hampir dapat ditemui dalam setiap organisasi, masyarakat dan kelompok lainnya hubungan anak-anak dengan orang dewasa adalah merupakan hubungan yang asimetris, tidak seimbang, anak selalu berada dalam posisi rendah, lebih lemah karena secara fisik anak-anak memang lebih rendah dan lemah dari pada orang dewasa. Kekerasan sering terjadi pada orang, kelompok yang secara fisik, struktur, budaya, akses politik dan sebagainya lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku. Kekerasan yang dialami oleh anak lebih banyak sebagai akibat dari posisi korban yang tersubordinasi dari pelaku tersebut. Beberapa indikator di antaranya ada perbedaan antagonis posisi struktur yang *vis*

a vis antara pelaku dengan korban, bagi korban indikatornya antara lain: jenis kelamin, usia, kondisi sosio-ekonomi, pendidikan dan kondisi korban ketika terjadi tindak kekerasan, sedangkan bagi pelaku tindak kekerasan indikatornya antara lain: jenis kelamin, usia, kondisi sosio-ekonomi, dan status pelaku.

Fenomena kekerasan yang terjadi, baik di ranah publik maupun nonpublik banyak di antaranya dilatarbelakangi hubungan struktural yang dominan bagi pelaku (*superordinate*) dan posisi lemah korban (*subordinate*), baik secara ekonomi, gender, dan hubungan kerja. Menurut hasil penelitian Heddy Shri Ahimsa Putra dkk.⁷ bahwa status pelaku kekerasan terhadap anak adalah ayah, ibu, guru, teman, saudara kandung, ayah angkat, ibu angkat, paman dan majikan/atasan. Jenis kekerasan yang sering dialami anak adalah kekerasan fisik, mental dan seksual, baik yang bersifat umum maupun khusus atau lebih berkonotasi pada sifat tindak kekerasan yang dialami anak. Sedangkan hasil penelitian yang dimuat surat kabar harian Jawa Pos dan Memorandum yang dilakukan Bagong Suyanto⁸ menemukan adanya kecenderungan korban kekerasan dalam posisi yang lemah, baik secara fisik untuk melawan maupun secara nonfisik.

Ada dua perspektif hasil penelitian fenomena kekerasan terhadap anak. *Pertama*, perspektif korban, indikatornya meliputi jenis kelamin, umur dan status pendidikan. Berdasarkan jenis kelamin yang dialami korban, didominasi oleh perempuan. Menurut berita yang diekspos Jawa Pos perbandingan antara perempuan dengan laki-laki adalah 7:3 (29,1% laki-laki dan 70,9 % perempuan), sedangkan menurut Memorandum 8:2 (19,2% laki-laki dan 80,8 perempuan). Ini berarti dari 10 kekerasan yang terjadi pada anak, 7-8 di antaranya adalah perempuan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, “dibandingkan anak laki-laki secara struktural anak perempuan memang lebih *vulnerable*, lebih lemah, lebih

⁷Heddy Shri Ahimsa Putra dkk., *A Focused Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia* (Yogyakarta: Centre for Tourism Research and Development Gadjah Mada University dengan United Nations Children’s Fund [UNICEF], 1999), 91-111.

⁸Bagong Suyanto, “Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar”, dalam *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penaggulangannya* (Surabaya: Lutfansah Meditama, 2000), 10-11.

tergantung dan lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku”.⁹ Secara sosiologis, kenyataan ini memang didukung oleh budaya paternalis yang berkembang di masyarakat yang lebih menempatkan perempuan pada posisi sekunder. Tiga kejadian eronis misalnya, seorang kakak kandung memperkosa adiknya sampai tiga kali terjadi di desa Pojok Campurdarat Tulungagung, seorang bapak memperkosa anak kandungnya selama satu tahun terjadi di Rejotangan Tulungagung. Juga kejadian yang tidak bermoral, teganya orang tua di Munjungan Trenggalek menjual anak gadisnya ke Germo Doli Surabaya.

Umur anak yang menjadi korban kekerasan relatif beragam, tetapi menurut sumber Jawa Pos yang terbanyak 33,9% dialami anak berusia 11,1–15 tahun, sedangkan menurut Memorandum juga pada usia yang sama terjadi kekerasan 31,7% dan urutan kedua anak usia 15,1–18 tahun, yakni 29,2% (Jawa Pos) dan 28,7% (Memorandum). Studi yang sama juga dilakukan oleh Irwanto¹⁰ menyimpulkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan separuhnya berusia di bawah 13 tahun dan sekitar 20% berusia di bawah 10 tahun. Tidak begitu jelas mengapa anak yang berlatar belakang ekonomi lemah cenderung mengalami tindak kekerasan yang lebih besar ketimbang anak dari keluarga golongan ekonomi menengah ke atas. Untuk kasus kekerasan anak, seperti diperkosa, diperlakukan kasar dan sebagainya pada dasarnya memang potensial terjadi di lingkungan komunitas yang sederhana, pinggiran dan miskin. Karena gaya hidup, kondisi lingkungan dan “ruang” untuk terjadinya peristiwa itu memang lebih terbuka. Ini terbukti di harian Jawa Pos 17,5% korban adalah berasal dari ekonomi lemah, sedangkan di Memorandum polanya hampir sama, yaitu 18,7% korban dari keluarga miskin.

Status pendidikan korban kekerasan, mayoritas mereka masih sekolah. Menurut Jawa Pos 68,9% korban masih sekolah, sedang menurut Memorandum ditemukan sebanyak 70,5%. Meskipun secara edukatif, seharusnya mereka sudah dapat memilah mana

⁹Harkristuti Harkrisnowo, “Anak dan Kekerasan: Kasus di Indonesia”, Makalah disajikan pada Lokakarya Hak Asasi dan Perlindungan Anak (Surabaya: Lembaga Pers UNITOMO dan UNICEF, Oktober 1998), 5.

¹⁰Irwanto, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi* (Jakarta: UNICEF, 1999), 7.

kondisi yang dapat menimbulkan bahaya, tetapi karena secara fisik si korban masih lemah, selain itu biasanya kejadian kekerasan terjadi pada durasi waktu yang sangat cepat sehingga sulit baginya untuk mengantisipasi. Kenyataan ini didukung oleh kejadian yang terekspose bahwa posisi korban ketika terjadi kekerasan berusaha untuk melawan 27,2% (Jawa Pos), pasrah/diam 28,7% (Memorandum). Ini menunjukkan bahwa korban sudah melakukan perlawanan, menghindar, tetapi karena kondisi fisik yang lemah menyebabkan mereka tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Pengertian kelemahan fisik dalam konteks ini antara lain tubuh masih kecil, perempuan lebih lemah ketimbang laki-laki dan sebagainya.

Kedua, dari perspektif pelaku, indikatornya jenis kelamin dan umur. Studi yang dilakukan Bagong Suyanto menemukan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak didominasi oleh kaum laki-laki.¹¹ Data yang berhasil dihimpun di Jawa Pos ada 84,5% sedang di Memorandum terjadi 89,1%. Ini tidak berarti hanya kaum lelaki yang cenderung lebih besar melakukan kekerasan terhadap anak, karena ternyata temuan Ahimsa Putra dkk. di Medan justru kaum ibu yang lebih banyak melakukan kekerasan.¹² Mungkin saja kenyataan ini dipicu oleh faktor kedekatan korban dengan pelaku atau tingkat intensitas hubungan di antara pelaku dengan korban. Umur pelaku kekerasan, mayoritas berumur 25-50 tahun. Berita yang diekspose Jawa Pos ada 51,5% dari 103 kejadian, sedang di Memorandum 48,3% dari 230 kejadian. Temuan ini menepis asumsi bahwa semakin dewasa seseorang akan semakin lebih rasional dan jernih dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Kondisi ekonomi, tampaknya menjadi faktor eksternal yang determinan menentukan kecenderungan tindak kekerasan ini, apalagi didukung oleh lemahnya pemahaman agama orang yang bersangkutan, sehingga memperlemah stabilitas emosional, yang diekspresikan dengan kemarahan dan kekerasan lainnya pada orang-orang di sekelilingnya yang dianggap lemah, seperti istri atau anak. Ini terbukti dari kejadian yang diekspose Jawa Pos 21,4% dari 103 pelaku kekerasan dari keluarga miskin (68,9% tidak jelas). Sedangkan

¹¹Suyanto, "Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar", 46.

¹²Putra dkk., *A Focused Study on Child Abuse*, 96-98.

menurut Memorandum ada 25,2% dari 230 kejadian, selebihnya 60,5% tidak jelas.

PEMICU KEKERASAN

Beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu tidak adanya kontrol sosial, hubungan hirarki sosial yang menempatkan anak pada posisi lemah, ketimpangan sosial dan struktur sosial ekonomi yang menindas, yang kadang melahirkan semacam budaya kekerasan khususnya di kalangan keluarga miskin. Menurut Ahimsa Putra kekerasan disebabkan oleh struktural dan situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.¹³ Sesuai beberapa hasil penelitian bahwa momen terjadinya kekerasan pada anak dalam banyak hal bersifat khusus dan situasional, biasanya kondisi dari pelaku adalah sedang tertekan, stress akibat tidak kuat menanggung tekanan dan beban sosial-ekonomi tertentu yang sedang dihadapinya. Secara khusus penelitian yang dilakukan Ahmad Sofian, Rinaldi, Emil W. Aulia & Agus Susanto¹⁴ terhadap pekerja anak jermal mencatat penyebab kekerasan yang dialaminya adalah kesenjangan status sosial anak jermal dengan pekerja dewasa, jauhnya lokasi dari pantauan hukum, sistem kerja yang unik, tidak tergantung pada ketentuan umum, tetapi tergantung pada potensi ikan, gairah seksual pekerja dewasa yang tidak tersalurkan.

Dipandang dari segi struktural, kekerasan yang dialami oleh pekerja anak menurut Radcliffe Brown adalah sebagai fungsi dari hubungan-hubungan yang ada antara anak dengan individu-individu lain dalam masyarakat, atau fungsi dari struktur tertentu yang melibatkan anak di dalamnya. Struktur ini sedikit banyak kemudian diperkuat oleh kondisi-kondisi sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵ Hubungan anak-anak dengan orang dewasa yang dapat ditemui hampir dalam setiap masyarakat adalah sebuah hubungan yang asimetris, yang tidak seimbang, anak selalu berada dalam posisi yang lebih rendah, lebih

¹³*Ibid.*, 145-173.

¹⁴Ahmad Sofian dkk., *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal* (Yogyakarta: PPK UGM, 1999), 35.

¹⁵Bagong Suyanto, Sri Sanituti Hariadi & Adriono, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya* (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001), 87.

lemah, karena secara fisik anak-anak memang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih tergantung pada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Hubungan yang sudah asimetris secara natural (umum, universal) seringkali kemudian diperkuat secara kultural, sehingga ketidakseimbangan yang terjadi semakin kuat serta menguntungkan orang dewasa. Dengan kematangan nalar, kelebihan pengetahuan dan kekuatan fisik, orang dewasa mampu memaksakan pendefinisian dan pemaknaan tertentu terhadap anak mengenai berbagai hal yang ada di sekeliling mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak menjadi sarana reproduksi makna dan pemaknaan tertentu yang dimiliki orang dewasa, dan inilah yang terjadi dalam proses sosialisasi.

Ketidakseimbangan natural dalam relasi anak dengan orang dewasa, orang dewasa, sadar atau tidak telah menciptakan ketidakseimbangan kultural dalam hubungan mereka dengan anak, yang menguntungkan orang dewasa. Sehingga dapat dirumuskan bahwa melalui ketidakseimbangan natural, orang dewasa memperkuatnya dengan ketidakseimbangan kultural yang mereka tanamkan pada anak-anak. Hasilnya, anak-anak menerima hubungan yang tidak seimbang itu, hubungan asimetris yang ada antara mereka dengan orang dewasa sebagai hal yang semestinya. Di sini anak, tanpa disadari telah mereproduksi hubungan asimetris yang merugikan, inilah akar dari berbagai kekerasan oleh orang dewasa terhadap anak.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI PENDEKATAN

Fenomena pada setiap masyarakat atau komunitas adalah terdapatnya kebersamaan dan konflik dalam proses sosial kesehariannya. Instrument untuk terwujudnya kebersamaan di antaranya adalah ditaatinya nilai-nilai, norma-norma dan aturan bersama yang menjadi dasar perilaku bersama. Kepentingan dan/atau aspirasi setiap individu haruslah dapat ditundukkan pada kepentingan bersama di bawah komando nilai dan norma tersebut, dalam bahasa falsafah Pancasila, kebersamaan akan terwujud jika kepentingan bersama berada di atas kepentingan atau aspirasi individu dan golongan. Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan

dalam keragaman dalam proses interaksi keseharian manusia.¹⁶ Jika norma-norma, nilai-nilai, dan aturan bersama tidak dapat menundukkan kepentingan, aspirasi dan perilaku anggota komunitas masyarakat, maka konflik biasanya tidak bisa dihindarkan.

Setiap komunitas pada umumnya mempunyai nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan struktur yang mencerminkan relasi di antara mereka dan memungkinkannya dapat mempengaruhi perilaku dalam bentuk konflik atau kebersamaan yang dapat mendinamisir tercapainya tujuan bersama melalui berkembangnya sistem otoritas yang secara natural, kultural, dan struktural. Otoritas berasal dari kata *authority* berarti kekuasaan yang memberi perintah, tata tertib, ketenteraman (*power to give orders*). Otoritas mengandung makna kekuasaan, kekuasaan cenderung mencerminkan struktural atau kedudukan. Mereka yang menduduki posisi otoritas tersebut secara etik diharapkan mampu mengendalikan subordinatnya. Mereka mendominasi karena harapan dari mereka yang mengelilinginya, bukan karena karakteristik psikologisnya. Seperti halnya otoritas, harapan-harapan ini melekat pada posisi bukan pada orang, otoritas ini bersifat legitimet, karena itu sanksi dapat diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi. Namun demikian sebagaimana dideskripsikan sebelumnya konflik yang menjurus munculnya pelaku kekerasan banyak didominasi oleh orang yang secara struktural mempunyai otoritas atas korban, seperti juragan, orang tua, teman yang lebih dewasa, maupun orang yang secara ekonomi lebih kaya/kuat dibanding korban, mereka juga kadang berlaku sewenang-wenang atas korban dengan memberi sanksi-sanksi atas hal yang dianggap salah oleh superordinat pada subordinat.

Kekuasaan memberi sanksi yang dimiliki oleh superordinat atas subordinat tersebut rawan terjadi penyimpangan. Terutama, ini berkaitan dengan konsep yang kedua, yakni konflik kepentingan. Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan, ia harapkan, dan perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam fikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat. Dalam setiap komunitas, mereka yang berada pada posisi dominan selalu berusaha mempertahankan kepentingan *status quonya*, sementara yang berada pada posisi

¹⁶Wijardjo dkk., *Konflik, Bahaya atau Peluang?* 36.

subordinate berkepentingan melakukan perubahan. Perbedaan kepentingan ini bila tidak dapat dikelola secara baik memungkinkan dapat berkembang menjadi suatu konflik, karenanya konflik kepentingan dalam komunitas apapun bersifat laten sepanjang waktu. Kepentingan sendiri bersifat multi-dimensional, beberapa kepentingan bersifat universal, seperti kebutuhan rasa aman, identitas sosial, restu sosial (*social approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Sementara, beberapa kepentingan juga ada yang bersifat spesifik untuk individu masing-masing anggota komunitas. Di lain pihak ada kepentingan yang bersifat lebih penting (prioritas) dari pada yang lainnya, dan tingkat prioritas tersebut berbeda pada masing-masing orang.

Benturan kepentingan antar kelompok superordinate dengan subordinate juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan aspirasi. Setiap aspirasi individu dan/atau kelompok mengandung tujuan dan standart. Tujuan merupakan arah, maksud dan hal yang diharapkan dicapai karenanya diperjuangkan oleh seseorang. Standart adalah merupakan ukuran atau kualitas minimal yang diharapkan terpenuhi oleh seseorang. Pada sisi yang lain harus dipahami bahwa pemuasan aspirasi pada pihaknya sendiri tidak boleh menghalangi pemuasan atas pihak lain, pencapaian tujuannya sendiri tidak boleh menghalangi pencapaian tujuan orang/pihak lain, pemenuhan standar diri tidak boleh menciderai pemenuhan pencapaian standar pihak lain. Semakin besar ketidakpuasan diri atas capaian aspirasi, tujuan dan standar kepentingannya dengan tidak dilandasi oleh etika proses sosial, toleransi, akomodasi dan penghargaan atas realitas keragaman, maka semakin besar pula perbedaan kepentingan itu akan dipersepsi yang akan berakibat pada timbulnya konflik.

Menurut Collins bahwa asumsi yang mendasari teorinya, yaitu secara tersirat orang dipandang dapat bersosialisasi namun juga rentan konflik dalam hubungan sosial mereka. Konflik cenderung terjadi dalam hubungan sosial karena “koersi dengan cara kekerasan” selalu dapat digunakan oleh seseorang atau beberapa orang dalam setting interaksi. Ia percaya bahwa orang berusaha memaksimalkan “status subyektif” mereka dan bahwa kemampuan mereka untuk melakukannya tergantung pada sumber daya mereka sendiri dan sumberdaya orang yang mereka ajak berinteraksi. Selain itu, ia

percaya bahwa orang memiliki kepentingan terhadap diri sendiri; jadi perbenturan mungkin terjadi karena serangkaian kepentingan mungkin saja bersifat antagonis.¹⁷ Berdasarkan asumsinya itu, kemudian ia merumuskan prinsip dasar teorinya. *Pertama*, orang hidup dalam dunia subyektif yang mereka konstruks sendiri. *Kedua*, orang lain mungkin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, atau bahkan mengontrol, pengalaman subyektif individu. *Ketiga*, seringkali orang lain mencoba mengontrol individu yang menentang mereka, akibatnya adalah kecenderungan konflik antar pribadi.¹⁸

Berdasarkan pada ketiga prinsip dasar inilah kemudian, dikembangkan prinsip-prinsip analisis teori konflik. *Pertama*, teori konflik harus memusatkan perhatiannya pada kehidupan nyata katimbang pada formulasi-formulasi abstrak. *Kedua*, teori konflik stratifikasi harus menelaah penataan material yang mempengaruhi interaksi sosial, misalnya ruang fisik, model komunikasi, persediaan alat-alat, dan lain-lain atau dengan kata lain variabel utamanya adalah sumber daya yang dimiliki oleh para aktor, aktor dengan sumberdaya berlebih mempertahankan atau memodifikasi hambatan-hambatan material ini, sementara itu yang memiliki sumberdaya lebih sedikit lebih cenderung membiarkan pikiran dan tindakan mereka ditentukan oleh setting material. *Ketiga*, dalam situasi yang timpang, kelompok-kelompok yang menguasai dan mengontrol sumberdaya cenderung mengeksploitasi mereka yang lemah dan miskin dengan sumberdaya yang dimilikinya. *Keempat*, ada kecenderungan bahwa kelompok-kelompok yang memiliki sumberdaya, dan dengan demikian memiliki kekuasaan, dapat memaksakan sistem gagasan mereka ke seluruh masyarakat, mereka yang tidak memiliki sumberdaya membiarkan sistem gagasan memaksanya.¹⁹

Keragaman komunitas dalam masyarakat Indonesia dapat dipetakan berdasarkan berbagai sudut pandang, misalnya warna kulit, etnis, ras, bahasa, budaya, geografi, stratifikasi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kecenderungan seks, disabilitas, dan lain sebagainya. Keragaman demikian hendaknya dipahami sebagai

¹⁷G. Ritzer & D.J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 289.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, 289-290.

keniscayaan natural sebagai landasan interaksi sosial dengan mengedepankan nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, sikap dan perilaku sosial yang memaklumi keragaman itu dalam suasana saling keterganungan, saling berbagi, saling tolong menolong dan saling menerima. Perasaan, sikap dan perilaku stereotip hendaknya dikesampingkan lebih jauh sehingga yang muncul adalah sikap empati dan *emic* yang mewujud dari kedalaman nurani masing-masing individu. Perbedaan dan keragaman tidak dipahami sebagai hambatan tetapi sebaliknya dipahami sebagai peluang untuk memaksimalkan potensi-potensi kemanusiaannya melalui pola interaksi inklusi sosial. Manusia dapat mengembangkan semua potensi-potensi internalnya hanya dengan memaksimalkan interaksi sosialnya dengan keragaman potensi-potensi eksternalnya yang ada di lingkungan masyarakat, pergaulan dan alam jagat raya. Pandangan demikian dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan konsep filsafat pendidikan multikultural yang dalam implementasinya menggunakan pilihan pendekatan yang relevan dengan situasi dan kondisi komunitas masyarakat sekitarnya.

Setidaknya ada tiga pilihan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu diposisikan sebagai landasan filsafat pendidikan, sebagai kajian ilmu pendidikan, dan sebagai pendekatan pendidikan. Jika diposisikan sebagai falsafah pendidikan, maka harus dianalisis secara filosofis ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Jika diposisikan sebagai bidang kajian keilmuan maka harus dipertegas dari sudut filsafat ilmunya, dan jika diposisikan sebagai pendekatan pendidikan, maka harus jelas apa yang didekati dan bagaimana melakukannya secara ilmiah, relevan dan benar. Menurut Amirin bahwa pendidikan multikultural di Indonesia lebih tepat diposisikan sebagai pendekatan pendidikan, yaitu pendekatan pendidikan yang mengupayakan agar nilai-nilai budaya kedaerahan (suku bangsa) dan agama di Indonesia dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan kebangsaan kewarganegaraan berlandaskan semboyan “bhineka tunggal ika” dan falsafah Pancasila, dengan mengedepankan toleransi dan

kerukunan antar budaya dan pemeluk agama.²⁰ Keragaman dipahami sebagai suatu keniscayaan, *inhern* dan *sunnatullah* untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan karena keragaman itulah alam ini menjadi indah, keindahan semakin tampak pada keseimbangan hubungan antar manusia dan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Pendekatan merupakan suatu proses, cara, menghampiri masalah-masalah tertentu, sedangkan pendekatan ilmiah merupakan penggunaan teori suatu bidang ilmu tertentu untuk mendekati suatu masalah. Dasar pengembangan pendekatan pendidikan adalah filsafat dan teori pendidikan, jika pendidikan multikultural akan diadopsi sebagai pendekatan pendidikan di Indonesia, maka perlu dikaji konsep dasarnya, yaitu landasan filsafatnya apa dan menggunakan teori-teori pendidikan apa. Ketuntasan dalam menemukan konsep dasar kelimuannya akan memungkinkan ditemukannya pendekatan pendidikan multikultural yang relevan dengan konteks keindonesiaan dalam proses pembelajaran. Setelah ditemukan pendekatan pendidikan multikultural selanjutnya akan ditemukan metode-metode dan teknik-teknik pembelajaran untuk melahirkan generasi bangsa yang berkarakter toleran dan menghargai keragaman sosial budaya. Tujuan dari penerapan pendekatan pendidikan multikultural setidaknya ada tiga, yaitu; (1). Meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental). (2) Menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal). (3) Menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).²¹ Kesadaran sebagai warga masyarakat yang berbhineka, yang beranekaragam dalam aspek budaya, ekonomi, sosial, politik, geografi, ras, etnik, bahasa, dan sebagainya. Kesadaran demikian diharapkan akan berujung hilangnya atau setidaknya mengurangi konflik-konflik dan kekerasan pada setiap kelompok masyarakat.

²⁰Tatang M. Amirin, "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2012), 15.

²¹Paul C. Gorski, *The Challenge of Defining Multicultural Education*. Diakses (Nopember, 2014), dari www.edchange.org/multicultural/initial.html.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1). Perilaku kekerasan merupakan manifestasi penyelesaian konflik yang negatif, karena kekerasan hakekatnya merupakan sikap dan perilaku yang membuat orang lain menjadi tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikis. (2). Posisi struktural menentukan terjadinya kekerasan. Pelaku biasanya orang yang kuat, baik dalam posisi struktur komunitas masyarakat (*superordinate*) maupun sosial ekonomi, sedangkan korban biasanya selalu orang yang lemah, baik secara struktur komunitas masyarakat (*subordinate*) maupun sosial ekonomi. (3). Pemicu timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan di antaranya adalah tidak adanya kontrol sosial, hubungan hirarkhis yang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi yang lemah (miskin). (4). Pendidikan multikultural dapat diposisikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran/pendidikan di Indonesia dengan terlebih dahulu mengkaji landasan filsafat dan teori pendidikannya yang selanjutnya ditemukan metode dan teknik pembelajaran/pendidikan untuk melahirkan generasi berkarakter yang berciri utama bertolernansi sosial dan kesadaran atas keniscayaan *sunnatullah* keragaman sehingga dapat mengurangi fenomena konflik yang berujung kekerasan, terutama pada anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Amirin, Tatang M. "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012.
- Coleman, James S. *Dasar-Dasar Teori Sosial Referensi bagi Reformasi, Restorasi dan Revolusi*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Daeng, Hans J. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Fromm, Erich. *Akar Kekerasan, Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*. terj. Imam Muttaqien, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Anak dan Kekerasan: Kasus di Indonesia*. Makalah disajikan pada lokakarya hak asasi dan perlindungan anak. Diselenggarakan oleh lembaga pers UNITOMO dan UNICEF, Surabaya, Oktober 1998.
- Irwanto. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta: UNICEF, 1999.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. "Tindak Kekerasan terhadap Anak: Bentuk, Pelaku dan Kondisinya", dalam buku *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa., dkk. *A Focused Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia*. Yogyakarta: Kerjasama Centre for Tourism Research and Development Gadjah Mada University dengan United Nations Children's Fund (UNICEF), 1999.
- Ritzer, G. & Goodman, D.J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Sofian, Ahmad dkk. *Kekerasan Seksual terhadap Anak Jermal*. Yogyakarta: PPK UGM, 1999.
- Suyanto, Bagong. "Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar". Dalam buku *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penaggulangannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000.
- Suyanto, Bagong., Hariadi, Sri Sanituti., & Adriono. *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2001.
- Wijardjo, Budi. Malik, Ichsan. Fauzi, Noer. & Royo, Antonette. *Konflik, Bahaya atau Peluang?* Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Gorski, Paul C. 2010. *The Challenge of Defining Multicultural Education*. Diakses Nopember 2014 dari www.edchange.org/multicultural/initial.html.

